



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

**PENDIDIKAN DAMAI: PENDEKATAN TRANSFORMATIF
DALAM MEWUJUDKAN DAMAI POSITIF BERKELANJUTAN
DI ACEH**

**PIDATO PENGUKUHAN
Jabatan Profesor dalam Bidang Ilmu Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh**

Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Malikussaleh
dalam rangka Pengukuhan Profesor
di Aula Cut Mutia Kampus Bukit Indah, Muara Satu
Kota Lhokseumawe, Selasa 11 Juli 2023

Oleh

Prof. Dr. Suadi, S.Ag., M.Si

**BUKIT INDAH, KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2023**

PENDIDIKAN DAMAI: PENDEKATAN TRANSFORMATIF DALAM MEWUJUDKAN DAMAI POSITIF BERKELANJUTAN DI ACEH

Suadi Zainal

Pidato Pengukuhan Profesor
Dalam Bidang Sosiologi – Transformasi Konflik dan Perdamaian
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
di Aula Cut Mutia Kampus Bukit Indah, Muara Satu
Kota Lhokseumawe, Selasa 11 Juli 2023

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yang kami hormati dan muliakan:

- Ketua, Sekretaris, dan Para Anggota Senat Akademik Universitas Malikussaleh.
- Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Malikussaleh.
- Dekan dan Para Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Malikussaleh.
- Para Professor di Lingkungan Universitas Malikussaleh
- Para Sesepuh, Para Dosen, Teman Sejawat, Sahabat, Tenaga Kependidikan, Para Mahasiswa, Seluruh Sivitas Akademika di Lingkungan Universitas Malikussaleh, Segenap Para Tamu Undangan, Keluarga Tercinta dan Para Hadirin yang berbahagia.

Segala puji dan syukur saya ucapkan ke hadirat Allah swt yang Maha Kuasa dan Bijaksana atas berkah rahmat dan kehendak-Nya, telah membawa kita semua untuk berkumpul di ruangan yang megah nan penuh khidmat ini dalam rangka mengikuti Sidang Terbuka Senat Pengukuhan Guru Besar di Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah mengajarkan kita dasar keimanan, serta menuntun kita kepada cahaya Islam sebagai pedoman hidup umat manusia.

Bagi seorang pria yang terlahir di pelosok desa dan tidak dibesarkan dalam keluarga yang akrab dengan nuansa akademik, merupakan sebuah anugerah ketika berhasil berdiri di depan majelis yang penuh dengan kemuliaan ini. Do'a orang tua, para guru, para sesepuh, para sahabat sekalian, serta keluarga tercinta telah memudahkan jalan yang saya tempuh hingga tiba pada titik ini. Untuk itu, izinkan saya dalam kesempatan ini membacakan pidato pengukuhan saya dalam Jabatan Guru Besar Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, dengan judul **“Pendidikan Damai: Pendekatan Transformatif dalam Mewujudkan Damai Positif Berkelanjutan di Aceh”**¹.

Ketua Senat Akademik, Bapak Rektor dan Anggota Senat Akademik, Universitas Malikussaleh serta para hadirin yang saya muliakan.

¹Judul ini merupakan hasil rekonstruksi dari beberapa karya penulis sebelumnya yang telah dipublikasikan, berkaitan dengan pendidikan perdamaian dan pembangunan perdamaian di Aceh.

Saya sangat menyadari bahwa apa yang saya sampaikan dalam majelis ini adalah tak ubah seperti “Setetes embun jatuh ke dalam lautan”, dan hanya secuil dari “Kalimat Allah” yang mampu saya tulis. **Firman-Nya “Qul lau kānal-baḥru midādal likalimāti rabbī lanafidal-baḥru qabla an tanfada kalimātu rabbī walau ji`nā bimislīhi madadā” (Al-Kahfi: 109).**

Para hadirin yang saya hormati,

Judul pidato yang saya pilih tidak terlepas dari pandangan saya melihat kondisi damai Aceh yang masih berkuat pada level perdamaian negatif (bebas dari perang) walaupun usianya hampir genap 18 tahun (15 Agustus 2005 – 11 Juli 2023). Selain masih terdapat sebagian poin perjanjian perdamaian yang belum terealisasi, Aceh juga belum bisa bebas dari berbagai ancaman bentuk kekerasan, baik dari tindakan manusia langsung maupun akibat ulah tangan manusia terhadap alam. Akibatnya, sebagian masyarakat Aceh belum bisa menikmati *peace dividend* dari perjanjian perdamaian, dan pelbagai perilaku kekerasan pun masih digunakan untuk menyelesaikan ragam jenis konflik di dalam kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri, Perjanjian Pedamaian (Mou Helsinki) telah mendatangkan banyak kebaikan bagi Aceh. Misalnya, Dana Otonomi Khusus, dari 2008 – 2021 Aceh menerima RP. 88.437.316.175.086.-. Selain itu, Aceh memiliki partai lokal yang tidak dimiliki Provinsi lainnya. Namun hal ini, belum mampu mensejahterakan masyarakat secara adil, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Ditambah lagi eksploitasi sumber daya alam yang tak terkawalkan, “demi” mengejar ketertinggalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh akibat konflik yang berkepanjangan, telah menimbulkan banjir dan kekeringan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya setiap tahunnya, dan ini terkesan dipandang sebagai “takdir” rutin musiman. Di mana penyelesaiannya pun reaktif pada tindakan bantuan kemanusiaan, belum pada akar permasalahan.

Dalam merespon realita tersebut, saya melihat pendidikan perdamaian adalah salah satu jalan yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi persolan tersebut. Dengan harapan, Aceh dapat memperoleh damai positif berkelanjutan, baik dalam konteks relasi antar manusia maupun manusia dengan ekologi (alam), dan bahkan relasi manusia dengan tuhan.

Para hadirin yang saya hormati,

Dalam pandangan sosiologis, konflik adalah satu keniscayaan yang tak pernah terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia tidak bisa dielakkan, tetapi dapat ditransformasikan agar tidak menimbulkan kekerasan dan kerusakan, bahkan dapat menjadi konstruktif bagi penguatan relasi dan pembangunan yang dapat membawa masyarakat kepada *Peaceful Society*. Oleh sebab itu, berbicara pendidikan damai/perdamaian tidak bermaksud untuk menghilangkan konflik, tetapi mentransformasi konflik dan menghilangkan pelbagai bentuk kekerasan (langsung dan tidak langsung atau kekerasan fisik, struktur, dan budaya) sehingga kondisi damai negatif Aceh hari ini dapat bertransformasi kepada perdamaian positif berkelanjutan, dan tidak kembali kepada konflik kekerasan/perang baik horizontal maupun vertikal.

Sebelum lebih lanjut saya menjelaskan mengenai pendidikan damai dan kaitannya dengan pembangunan perdamaian positif berkelanjutan, terlebih dahulu kita coba memahami makna

damai/perdamaian dari pandangan para ahli.

Makna Damai: dari Negatif hingga Positif Berkelanjutan

Perdamaian dapat dimaknai sebagai satu keadaan, nilai, cara, dan tujuan (Castro, L. Navaro & Galace, 2008). Memahaminya, diperlukan lebih banyak pengetahuan tentang konflik (Brewer, 2010). Menurut Hicks (1985) bahwa perdamaian bukan semata-mata tidak adanya kekerasan terang-terangan (*overt violence*), tetapi juga mencakupi wujud keadilan sosial, ekonomi, dan politik (Fountain, 1999). Oleh karenanya, ia mengandung arti lebih dari tidak ada perang dan permusuhan (Miller & King, 2005).

Dalam pendekatan transformatif, perdamaian ialah suatu proses, memiliki banyak bentuk, perjuangan yang tidak pernah tamat untuk mentransformasi kekerasan (Fisher, 2000). Pembentukan perdamaian tidak akan pernah berakhir, karena ianya bukan sebatas tujuan yang hendak dicapai, tetapi cara hidup (Mitroiu & Adam, 2009). Untuk itu, perdamaian dipandang bersifat dinamis, dengannya manusia dapat berinteraksi secara harmonis dan bekerja sama melangkah untuk membangun kebaikan kemanusiaan yang lebih luas (Kumar, 2012). Konflik ditransformasikan secara konstruktif tanpa batas waktu, bergerak dinamis sesuai dengan masa depan yang diinginkan bersama, dengan melibatkan pelbagai pihak (Miall, 2004).

Oleh karena itu, Galtung (1967) telah membagikan perdamaian berdasarkan substansinya, dengan merujuk kepada jenis kekerasan (kekerasan budaya, struktur dan kekerasan langsung - fisik), yaitu; perdamaian negatif dan perdamaian positif. Beliau mendefinisikan perdamaian negatif sebagai keadaan yang tidak ada kekerasan kolektif yang terorganisir (*absence of organized collective violence*). Sedangkan perdamaian positif ialah satu keadaan di dalamnya terdapat nilai-nilai yang secara relatif telah disepakati oleh masyarakat dunia, seperti adanya kerjasama, bebas daripada ketakutan, bebas daripada kekurangan, ekonomi tumbuh dan berkembang, tidak adanya eksploitasi, adanya persamaan, keadilan, bebas bertindak, pluralisme dan dinamisme.

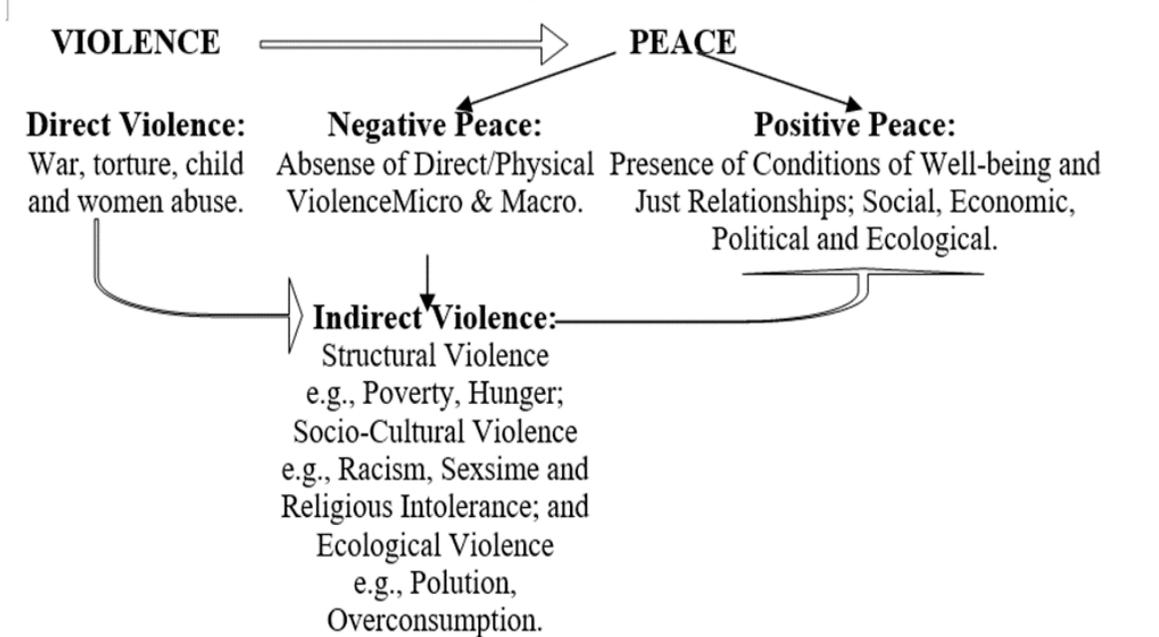
Kemudian istilah perdamaian positif, oleh ahli sains konflik dan perdamaian dikembangkan lagi menjadi perdamaian berkelanjutan dengan menambahkan aspek ekologi dalam mengkaji dan menilai perdamaian. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan perdamaian perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip *sustainable development*. Dengan kata lainnya, transformasi konflik dan perdamaian positif berkelanjutan identik dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang menjamin kesediaannya bagi generasi ke depan. Dalam hal ini, Franke dan Warnecke (2010) menjelaskan bahwa: “*Conflict transformation and sustainable development both pursue the ideal end-state of a legitimately governed and economically viable peaceful society based on the rule of law*”. Kebalikan dari itu, “*....Scarcities of resources and environmental degradation combine with rapidly expanding populations to lead to the breakdown of local communities and to the ethnic and tribal violence that has become the main characteristic of the post-cold war era*” (Daimond, 1997).

Selanjutnya, dalam menjelaskan perdamaian yang mencakup terminologi “*positive peace dan sustainable peace*” sebagai satu level perdamaian paling ideal (menurut penulis), saya menggabungkannya dengan sebutan “perdamaian positif berkelanjutan” (*sustainable positive peace*). Istilah ini telah diperkenalkan oleh Suadi Zainal & Kamarulzaman Askandar, sejak (2013) melalui artikel di Jurnal Administrasi Publik – LAN, “**Political Transformation and Prospects**

for Sustainable Positive Peace in Aceh” yang dimaknai sebagai JALAN/CARA dan TUJUAN.

1. Sebagai jalan; kekerasan bersenjata/fisik dihentikan, kekerasan non fisik (psikologi, struktural dan kultural) dieliminasi, konflik diselesaikan dengan cara yang konstruktif, dan damai yang dicapai perlu memperoleh legitimasi yang tinggi dari pihak dalam maupun pihak luar.
2. Sebagai tujuan; perdamaian harus sampai kepada satu keadaan tidak ada kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung yang mencakup aspek relasi antar manusia serta relasi manusia dengan ekologi. Pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tidak mengancam pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

Gambaran perdamaian positif berkelanjutan sebagaimana dimaksudkan, dapat dipahami melalui karya Castro & Galace (2008) *Peace Education: A Pathway to A Cultural Peace*” yang dimodifikasikan oleh Suadi Zainal (2016) seperti pada gambar berikut:



Gambaran tersebut dapat diperkuat dengan konsep Lederach (1999), bahwa pembangunan perdamaian menghendaki satu gerakan perdamaian dan proses proaktif yang berkelanjutan untuk mewujudkan spiral perdamaian dan pembangunan agar dapat mencegah konflik dan mempromosikan visi masa depan yang harmonis dan lagi damai. Dalam hal ini, usaha-usaha jangka pendek harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat berimplikasi kepada usaha-usaha jangka panjang untuk pembentukan hubungan yang damai, yang terdiri dari tingkat hubungan kejiwaan, spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan militer. Hal ini dicirikan oleh keadaan tidak adanya kekerasan fisik, tidak adanya diskriminasi politik, ekonomi, dan budaya, tingginya legitimasi internal dan eksternal, mampu mengendalikan diri sendiri, dan cenderung mempertingkatkan transformasi konflik konstruktif (Reychler, 2002).

Selanjutnya, untuk mencapai pada kondisi ideal tersebut, konsep perdamaian positif berkelanjutan mesti dipedomani sebagai kerangka kerja dalam usaha menghilangkan segala bentuk kekerasan², kekerasan terbuka/langsung (kekerasan fisik dan psikologi) dan tersembunyi/tidak langsung (kekerasan struktur dan kekerasan budaya) dengan perhatian utamanya adalah masalah ketidakadilan dan penindasan, dan keperluan kepada ketertiban sosial yang lebih adil untuk memenuhi keperluan-keperluan dan hak-hak asasi semua masyarakat. Hal ini sangat memungkinkan untuk diwujudkan melalui delapan pilar pembangunan perdamaian, yaitu; fungsi pemerintah yang baik, lingkungan bisnis yang sehat, distribusi sumber daya yang adil, penerimaan hak orang lain, relasi yang baik dengan tetangga, aliran informasi yang bebas, partisipasi pendidikan tinggi dan tingkat korupsi rendah (Coleman, 2012).

Dalam praktiknya, aktivitas utama pembangunan perdamaian paska konflik adalah mentransformasi kekerasan struktur dan budaya kepada struktur dan budaya damai. Transformasi struktur berkaitan dengan sistem sosio-politik dan ekonomi yang dapat memupuk keadilan dan menjamin perdamaian berkelanjutan dengan sendirinya (Initiative, 2008). Kekerasan struktur merupakan hasil dari struktur sosial, dan politik yang represif serta ekonomi yang eksploitatif (Galtung, 1996). Sementara transformasi budaya berkaitan dengan upaya merubah budaya kekerasan dan perang (yang mensokong timbulnya kekerasan fisik, psikologi, dan kekerasan struktur) kepada budaya damai. Menurut Ubogu (2016) budaya damai mencakup nilai-nilai, sikap, tradisi, cara berperilaku, dan jalan hidup masyarakat. Dalam Resolusi 52/13 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat tujuh aspek utama dari budaya damai/perdamaian yaitu: hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, promosi pembangunan, pendidikan untuk perdamaian, arus informasi yang bebas, dan partisipasi perempuan yang lebih luas. Untuk setiap aspek, diperlukan tindakan untuk mengubah seperangkat nilai, sikap, dan perilaku individu, kolektif, dan institusi yang mendasar bagi budaya perang dan kekerasan (Mayor, 2009). Dengan demikian, budaya damai³ dapat terwujud dalam masyarakat yang telah mengalami konflik/perang. Hague Appeal of Peace (2005) mengemukakan bahwa budaya perdamaian akan tercapai ketika warga dunia memahami masalah global, memiliki keterampilan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif dan mengamati hak asasi manusia, kesetaraan gender dan ras, menghargai keragaman budaya, dan menghormati integritas bumi. Realitas semacam ini dapat dicapai melalui pendidikan berkelanjutan dan sistematis yang disengaja untuk perdamaian, dan kebebasan fundamental (Wintersteiner, 2013).

²Kekerasan langsung dapat dipahami sebagai tindakan agresi fisik atau psikologis terhadap individu atau kelompok. Sedangkan kekerasan tidak langsung terdiri dari kekerasan struktural dan kultural. Kekerasan struktural dapat dipahami sebagai aspek-aspek organisasi atau masyarakat yang secara tidak langsung merugikan orang atau kelompok melalui perlakuan yang tidak adil dan tidak merata (misalnya kurangnya akses ke perawatan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu). Sementara kekerasan budaya dapat dipahami sebagai wacana, narasi, dan keyakinan yang memungkinkan muncul kekerasan struktural dan langsung (misalnya ketidakpedulian terhadap kekerasan dalam rumah tangga, atau keyakinan bahwa laki-laki kulit hitam lebih agresif daripada laki-laki kulit putih). Kekerasan struktural dan kekerasan kultural saling berkaitan. Struktur masyarakat (yang keras) menyediakan mekanisme untuk berlakunya kekerasan kultural, dan nilai-nilai budaya (yang keras) memberikan dukungan bagi kelanjutan kekerasan struktural (Galtung, 1996) dalam *Positive Peace in Schools* (Cremin & Bevington, 2017).

³Budaya perdamaian dapat didefinisikan sebagai mosaik identitas, sikap, nilai, kepercayaan, dan pola perilaku masyarakat yang mengarahkan orang, untuk hidup saling memelihara satu sama lain dan juga memelihara bumi tanpa perbedaan kekuatan/kekuasaan yang terstruktur, dan untuk menghadapi perbedaan secara kreatif dan berbagi sumber daya yang dimiliki (Boulding, 2002).

Para hadirin yang saya hormati,

Pendekatan Transformatif untuk Pembangunan damai Positif Berkelanjutan

Konflik dan damai tidak saling bertentangan apabila yang berkonflik menggunakan cara damai dalam penyelesaian dan transformasi konflik (Webel & Galtung, 2007). Konsep transformasi konflik dimunculkan oleh Lederach melalui karya-karyanya, *Preparing for peace: Conflict transformation across cultures* (1996), *Sustainable reconciliation in divided societies* (1997), *Just peace: The challenge of the 21st century*, (1999), dan *Little book of conflict transformation: Clear articulation of the guiding principles by a pioneer in the field* (2015). Ia melihat dan menganggap pasang surutnya konflik sosial sebagai peluang bagi melakukan perubahan sosial yang konstruktif untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan keadilan. Tumpuannya adalah pada perubahan konflik, bukan pada pengendalian dan penamatan konflik. Sejalan itu, Fisher (2001) menyatakan bahwa tujuan transformasi konflik adalah mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha merubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Hal senada, Zainal (2016) mengatakan transformasi konflik tidak bermaksud mengakhiri konflik, tetapi mewujudkan keadilan melalui perubahan struktur yang mendalam.

Menurut para ahli dan praktisi perdamaian ada beberapa elemen-elemen yang perlu ditransformasikan untuk mencapai perdamaian positif berkelanjutan. Menurut Lederach (2015) unsur yang perlu ditransformasikan adalah:

1. *Transformasi personal*; merujuk kepada perubahan yang mempengaruhi individu yang meliputi aspek-aspek kognitif, emosi, persepsi, dan spiritual dari pengalaman manusia selama masa konflik.
2. *Transformasi hubungan*, merujuk pada perubahan pola komunikasi dan interaksi sebagai akibat dari konflik. Meminimalkan komunikasi yang kurang berfaedah dan memaksimalkan saling pengertian antara mereka yang bertikai.
3. *Transformasi struktur*; merujuk kepada cara masyarakat membangun dan mengatur hubungan sosial, ekonomi, politik dan hubungan institusi untuk memenuhi keperluan asas manusia dan menyediakan akses kepada sumber daya serta membuat kebijakan yang mempengaruhi kelompok, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan.
4. *Transformasi budaya*; adalah perubahan pola-pola budaya yang menyumbang lahirnya konflik kekerasan kepada budaya konstruktif untuk menangani konflik.

Selanjutnya, hal serupa juga dikatakan Miall et al (2004) bahwa transformasi konflik untuk pembangunan perdamaian dapat dijalankan melalui lima aspek:

1. *Transformasi konteks*; konflik dinisbahkan ke dalam konteks sosial, kawasan dan antarabangsa.
2. *Transformasi struktur*; meliputi perubahan hubungan kuasa yang tidak seimbang menjadi seimbang, perubahan struktur kekuasaan, dan perubahan tujuan konflik/perang.
3. *Transformasi aktor*; mencakup perubahan individu, perubahan kepimpinan, perubahan tujuan, perubahan golongan pemimpin atau mengadopsi tujuan, nilai dan keyakinan baru.
4. *Transformasi isu/persoalan*; hal ini memiliki kaitan dengan kedudukan para pihak yang berkonflik terhadap isu yang dipertentangkan. Transformasi satu isu ke isu lainnya, akan membuka peluang untuk menyelesaikan konflik.

Unsur-unsur transformasi tersebut dapat dioperasionalkan tidak hanya pada para pihak (aktor-

aktor utama) yang berkonflik secara langsung, tetapi juga terhadap para aktor-aktor tidak langsung yang ikut mengalami dan mengetahui suatu konflik. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan tidak dapat mengecualikan unsur-unsur tersebut dalam memainkan peranannya, mentransformasikan konflik dan membangun perdamaian positif berkelanjutan di Aceh. Terkhusus transformasi budaya, konteks, dan isu, lembaga pendidikan dapat melakukannya secara langsung agar pemuda dan generasi Aceh dapat menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi secara konstruktif dan damai, baik dalam kaitan relasi Aceh dengan Indonesia maupun dalam interaksi masyarakat.

Para hadirin terhormat yang saya muliakan,

Konsep Pendidikan Damai di Institusi Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting untuk mendukung transformasi masyarakat pasca konflik bersenjata (Harber, 2018; Higgins & Novelli, 2020; Novelli et al., 2014). Masyarakat yang terpecah belah dapat bekerja menuju perdamaian karena pendidikan membantu perubahan sosial-politik sehingga mengarah pada rekonstruksi hubungan masyarakat (Gill & Niens, 2014). Selain itu, pendidikan mempromosikan emosi sosial yang diperlukan untuk mendukung proses perdamaian, seperti simpati atas penderitaan orang lain, kasih sayang untuk korban, pengampunan untuk pelanggar, toleransi terhadap identitas dan budaya yang berbeda dari orang lain, optimis untuk masa depan, dan keberanian untuk mendorong timbulnya kepercayaan (Brewer, 2010). Hal ini mengatasi ketidaksetaraan, mengatasi prasangka, dan memupuk nilai-nilai baru dalam institusi. Pendidikan dipandang sebagai agen dalam mengembangkan dan mengubah nilai-nilai budaya di kalangan peserta didik dari kekerasan menjadi damai, sehingga menghilangkan potensi konflik kekerasan (Ritiauw, 2017).

Pendidikan perdamaian tujuannya menghilangkan jenis kekerasan langsung, struktural, dan budaya (Cremin & Guilherme, 2016). Senada itu, menurut (Davies, 2015; Mendenhall & Chopra, 2016; Tinker, 2016), pendidikan perdamaian merupakan *soft essential tool* yang dapat digunakan untuk menghadirkan perdamaian positif di wilayah pascakonflik. Ia merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat bekas konflik (Tschirgi, 2011). Melalui pendidikan damai, setiap manusia dibekali untuk memahami konflik dan pembangunan perdamaian untuk menghilangkan kekerasan (Maleki & Komishani, 2014). Pendidikan perdamaian berfungsi untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian konflik konstruktif peserta didik, mengurangi perilaku agresif, dan memungkinkan mereka memiliki kemampuan memecahkan masalah (Ay et al., 2019; Turk, 2018) sehingga tercipta masyarakat yang damai.

Materi Pendidikan Perdamaian

Menurut Brock (2011) bahwa konteks pasca konflik memberikan peluang bagi agen pendidikan untuk mengadopsi pendekatan baru yang fundamental dalam pembangunan perdamaian. Salah satu caranya, mengarahkan pendidikan untuk mengadopsi literatur tentang rekonstruksi pasca konflik (Akulluezati et al., 2011). Selanjutnya, Bajaj (2016) menyatakan bahwa aspek penting dari transformasi pendidikan untuk perdamaian adalah memperkenalkan mata pelajaran baru ke dalam kurikulum untuk menciptakan individu dan masyarakat yang lebih damai. Kurikulum pendidikan perdamaian harus mencakup tujuh kompetensi inti, yaitu (1) berpikir kritis dan analisis, (2) empati dan solidaritas, (3) agensi individu dan kolektif, (4) partisipatori dan keterlibatan demokratis, (5) pendidikan inovatif dan strategi komunikasi, (6) keterampilan transformasi konflik, dan (7) praktik reflektif berkelanjutan. Sementara itu, Cunningham (2015) menjelaskan bahwa pendidikan perdamaian membutuhkan materi pelajaran untuk mengembangkan kesadaran diri dan pengendalian diri. Hal ini berguna dalam membangun simpati terhadap orang lain, kepekaan, dan

mengembangkan keterampilan kerja sama. Pada masa konflik atau pasca konflik, pendidikan perdamaian perlu diarahkan untuk mengubah pola pikir kelompok, saling pengertian, dan tanggung jawab atas penderitaan orang lain.

Hantzopoulos (2021) menambahkan bahwa pendidikan perdamaian tidak terbatas pada kurikulum mata pelajaran. Bahkan ia membutuhkan transformasi konten, pedagogi, struktur, praktik pendidikan, hubungan antara pendidik dan peserta didik, dan sistem pengukuran hasil pendidikan yang lebih luas. Kurikulumnya diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja karena juga perlu menentukan strategi terbaik untuk mengelola lembaga pendidikan untuk menyesuaikan perilaku semua pihak yang terlibat dalamnya. Selain itu, isi dan metode pembelajaran di seluruh kurikulum perlu mencerminkan kompetensi, perilaku damai, demokratis, inklusif, dan nilai-nilai partisipatif.

Hadirin terhormat yang saya muliakan,

Peran Pendidikan Perdamaian dalam Pembangunan Perdamaian Positif Berkelanjutan

Pendidikan perdamaian dalam situasi pasca-konflik membantu mengubah struktur dan memperkuat peran positif dengan mempromosikan perluasan, kesetaraan, dan konten pendidikan yang berbeda untuk mengatasi penyebab konflik yang mengakar. Proses ini membutuhkan program pendidikan jangka panjang dan pendekatan yang lebih kompleks untuk mengubah sistem pendidikan (Novelli & Cardozo, 2008). Menurut Novelli & Smith (2011), pendidikan sangat penting untuk pembangunan perdamaian. Laporan Pemantauan Global Pendidikan UNESCO menyatakan bahwa "Konflik bersenjata dalam suatu negara sering dikaitkan dengan keluhan dan ketidakadilan yang dirasakan terkait dengan identitas, keyakinan, etnis, dan wilayah". Selanjutnya, "Tidak ada negara yang berharap untuk hidup damai dan sejahtera kecuali membangun rasa saling percaya di antara warganya". Ini dimulai dari ruang kelas, dan sekolah perlu dilihat sebagai tempat untuk menyebarkan keterampilan yang paling penting, seperti toleransi, saling menghormati, dan kemampuan untuk hidup damai dengan orang lain" (Lerch & Buckner, 2018; Smith, 2010).

King (2011) pula menyatakan bahwa sekolah (termasuk perguruan tinggi) berkontribusi pada pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik dengan memulihkan kenormalan dan membantu harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, pendidik memainkan peran penting dalam mengubah struktur masyarakat, terutama dalam konteks pasca konflik (Lopes Cardozo & Hoeks, 2015; Shepler, 2011). Selanjutnya, (Bevington et al., 2020; Emkic & Emkic, 2018) menyatakan bahwa sektor pendidikan merupakan komponen krusial dalam upaya pembangunan perdamaian dan pemulihan awal suatu negara yang mengalami konflik. Atas dasar ini, pendidikan merupakan satu sektor yang dapat digunakan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat perdamaian. Menurut Smith & Ellison (2015), ada lima rasionalisasi peran pendidikan untuk pembangunan perdamaian, yaitu; (1) memberikan pelatihan keterampilan (2) melindungi anak dari kekerasan, (3) membantu membangun kembali kenormalan, (4) membantu membangun fondasi damai yang hilang, dan (5) berkontribusi pada transformasi sosial.

Oleh sebab itu, sistem pendidikan yang menghendaki kondisi harmoni dengan mengedepan pendidikan moral, kewarganegaraan, pendidikan demokratis atau global, belum memadai untuk membangun perdamaian positif berkelanjutan. Pendidikan damai berbeda dan melampaui itu, dengan fokus pada isu kekerasan, konflik dan damai. Tujuannya; melindungi pikiran peserta didik dari pengaruh kekerasan di masyarakat; menginspirasi mereka kesadaran, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan dunia yang damai (Borkar & Jain, 2014). Pendidikan

perdamaian dengan prinsip-prinsip perdamaian positif berkelanjutan harus mampu menangkal semua jenis kekerasan, kekerasan langsung, sistemik, dan budaya (Galtung, 2008) di antara masyarakat, pemuda dan generasi mendatang. Untuk itu, pendidikan harus diselenggarakan untuk tujuan utamanya, membekali individu pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan bertindak untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, menciptakan serta mempertahankan keharmonisan, dan membangun hubungan antar masyarakat yang saling menguntungkan (Johnson & Johnson, 2006). Dengan begitu, dalam konteks mikro, kekerasan simbolik dan bullying di lingkungan lembaga pendidikan akan terhapuskan (Waldron, 2009). Sementara dalam konteks makro, karena peserta didik sudah terbiasa dengan budaya damai di sekolah atau perguruan tinggi tentu mereka akan merespon setiap persoalan yang dihadapi dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang telah tertanam dalam diri mereka. Selanjutnya, keberadaan mereka dalam satu kelompok, komunitas, dan organisasi akan berkontribusi pada pembentukan struktur dan budaya damai.

Para hadirin yang terhormat,

Urgensi Pendidikan Damai di Aceh Pasca Konflik

Uraian sebelumnya telah memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara pendidikan, terkhusus lagi pendidikan perdamaian dan pembangunan perdamaian dalam konteks transformasi damai negatif kepada damai positif berkelanjutan. Sebagai satu kesimpulan singkat dan padat dari uraian tersebut, kalimat Nelson Mandela (mantan Presiden Afrika Selatan dan aktivis perdamaian tanpa kekerasan), mungkin tepat merangkuminya, *“Education is the most powerful weapon that you can use to change the world”*, yang berarti bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk melakukan perubahan sosial tanpa kekerasan (Zainal et al., 2022). Selanjutnya, dapat pula disimpulkan beberapa poin penting, bahwa:

- Pendidikan perdamaian adalah sarana untuk membentuk budaya damai sehingga tercipta perdamaian positif berkelanjutan dan mencegah perang/konflik muncul kembali
- Pendidikan dapat menegakkan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengubah status mereka dalam masyarakat
- Lembaga pendidikan, dengan pendidikan perdamaian dapat mengajarkan nilai perdamaian melalui pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Hal ini dapat dilakukan baik melalui materi pelajaran maupun metode pembelajaran.
- Para ilmuan dan praktisi perdamaian telah menyakini pendidikan perdamaian sangat fungsional bagi pembangunan perdamaian positif berkelanjutan.

Atas dasar itu, Henderson (2021) menyatakan bahwa sistem pendidikan yang dikelola dengan baik diperlukan untuk memutus siklus kekerasan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, tentu pendidikan perdamaian mesti diadopsi ke dalam setiap lembaga pendidikan untuk semua level, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (Askandar, 2006). Dengan demikian, pendidikan damai dapat menjadi *soft strategy* untuk mencapai perdamaian positif berkelanjutan - tidak ada segala bentuk kekerasan terhadap manusia dan alam. Kondisi ini akan memungkinkan setiap individu memenuhi kebutuhannya dengan potensi daya yang dimiliki.

Namun demikian, hampir 18 tahun usia perdamaian Aceh (2005-2023), ragam persoalan kekerasan masih mengemuka:

- Transformasi ideologi GAM dari Nasionalisme Aceh Self Determination ke Nasionalisme Aceh-Self Government telah menimbulkan varian konflik politik (Saputra, 2022), vertikal dan horizontal. Vertikal: sementara horizontal (antara mantan elit GAM, prajurit, dan

kelompok masyarakat (Ansori, 2012; Barron et al., 2013; Quayle, 2018).

- Ketidakadilan Peace Dividend dan belum tuntas masalah korban konflik
- Sekitar 251 ribu hektar hutan di Provinsi Aceh dalam keadaan rusak (Narindrani, 2018) akibat dari pembangunan eksplotatif.
- Bencana banjir dan longsor menjadi fenomena rutin tahunan yang mengancam kehidupan manusia dan sumberdaya ekologi yang dimiliki, akibat tindakan eksploitatif terhadap alam atas nama kepentingan kesejahteraan ekonomi.

Ragam fenomena konflik dan kekerasan tersebut dapat membuat masyarakat Aceh terjerumus dalam konflik kekerasan yang baru. Oleh karena itu, Aceh sangat membutuhkan penerapan pendidikan perdamaian di semua level dan bentuk lembaga pendidikan di Aceh, formal dan non formal.

Kenyataan tersebut tentu tidak terlepas dari realitas praktik “pendidikan damai” pada instansi lembaga pendidikan di Aceh yang belum terintegral secara sistemik, baik pada level sekolah maupun perguruan tinggi.

Sekolah

- Masih mengandalkan pendidikan agama dan Pancasila serta ekstra kurikuler sebagai pendidikan damai
- Belum mengadopsi sistem pendidikan perdamaian, padahal pihak NGO (UNICEF dan USAID) serta NGO lainnya telah menginisiasi terbentuknya kurikulum pendidikan damai bersama perguruan tinggi di Aceh, seperti “Kurikulum Aqidah Akhlak dalam Konteks Pendidikan Damai” (Zainal et al., 2020).

Perguruan Tinggi (PT)

- Belum ada kurikulum pendidikan damai secara spesifik yang dapat diimplementasikan di semua program studi di lingkungan perguruan tinggi.
- Isu yang dibahas masih bersifat tematik dalam mata kuliah tertentu
- Masih bersifat spasial, belum terintegrasi di semua prodi di lingkungan PT
- Lembaga pusat kajian konflik dan perdamaian di lingkungan PT fokus pada konferensi & workshop. Belum berperan sebagai leading institution dalam mengembangkan pendidikan damai di lingkungan sendiri. Bahkan sebagiannya terkesan MATI SURI, seperti Aceh Peace Consultative Management (APCM) yang didirikan pasca damai.

Dalam praktik yang demikian, tujuan pendidikan perdamaian tidak dapat tercapai secara optimal; membawa perubahan perilaku yang memungkinkan anak-anak, remaja, dan orang dewasa untuk mampu menyelesaikan ragam persoalan atau konflik yang dihadapi secara konstruktif tanpa kekerasan, dan mampu mentransformasi serta mencegah konflik dan kekerasan, baik yang terbuka maupun struktural dan kultural. Terlebih lagi, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan damai di tingkat intrapersonal, interpersonal, antarkelompok, nasional, atau internasional (Das & Das, 2014; Eliasa et al., 2019) batunya, masyarakat Aceh dan orang lain yang sedang berada di Aceh sulit untuk merasakan damai positif, baik dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan/ekologi (Navarro-Castro & Nario-Galace, 2010), bahkan terkadang pada dimensi spiritual dalam kepribadian mereka (J. Lederach, 2015).

Hadirin terhormat yang berbahagia,

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pelaksanakan Pendidikan damai di Aceh, baik pada level sekolah dan perguruan tinggi selama ini masih terbatas dan parsial, sehingga terlihat belum efektif untuk pembangunan perdamaian positif berkelanjutan. Hal ini terlihat dari ragam bentuk kekerasan yang mengemuka, baik dalam konteks relasi antar manusia maupun relasi manusia dalam memperlakukan lingkungan/alam.

Atas dasar itu, dipandang perlu diinisiasikan lahir kebijakan untuk rekonstruksi sistem pendidikan yang memungkinkan pelaksanaan pendidikan damai, baik formal dan non formal di lingkungan pendidikan. Hal yang paling mudah untuk dilaksanakan untuk semua bidang ilmu/pelajaran adalah melalui metode pembelajaran di kelas, dengan mendesain lingkungan dan ruang kelas yang demokratis agar peserta didik terbiasa diperlakukan setara dan adil, tidak exploitatif, bebas berpendapat, dan kerjasama kelompok dalam proses pembelajaran sehingga budaya damai terinternalisasikan dalam diri mereka. Selain itu, perlu dilakukan restrukturisasi dan revitalisasi pusat kajian konflik dan perdamaian di perguruan tinggi sehingga dapat berperan sebagai penggerak utama pembangunan perdamaian secara kontinu, terutama melalui institusi pendidikan; di internal PT, di luar PT, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.

Bapak Rektor, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Malikussaleh, dan para hadirin yang saya muliakan.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan terakhir, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian jenjang jabatan fungsional guru besar saya ini, yang mudah-mudahan dapat memberikan makna bagi saya, keluarga, lembaga tempat saya mengabdikan, bangsa dan agama.

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku Jabatan Fungsional Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.
2. Kepada Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM. ASEAN Eng., beserta Para Wakil Rektor yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, dan menyetujui pengusulan jabatan fungsional Guru Besar kepada saya.
3. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor Universitas Malikussaleh terdahulu, Prof. A. Hadi Arifin, M.Si (1999-2010) dan Prof. Dr. Apridar, M.Si (2010-2018), beserta para wakil rektor terdahulu, yang tentu saja telah berkontribusi banyak dalam serangkaian proses menuju jabatan guru besar saya.
4. Kepada Dekan dan Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Terima kasih telah menyetujui usulan dan dukungan

- penuh dalam memperoleh jabatan Guru Besar saya.
5. Terima kasih juga kepada para Dekan Senior dan Para Wakil Dekan Senior yang ikut berjuang bersama dalam proses pengurusan usulan guru besar saya.
 6. Terima kasih kepada Ketua Senat, Sekretaris Senat, serta Bapak/Ibu Anggota Senat Akademik Universitas Malikussaleh yang sudah mempertimbangkan usulan saya di Tingkat Universitas, dari tahap pemberian rekomendasi, sampai dengan pengukuhan pada hari ini. Tentu saja tidak lupa kepada Majelis Senat Universitas pada periode sebelumnya, yaitu periode 2018 s.d 2022, yang juga sangat banyak berkontribusi dalam setiap tahapan proses ini.
 7. Terima kasih kepada Ketua beserta anggota PPAK Universitas Malikussaleh yang telah bekerja keras mengevaluasi dengan cermat berkas usulan Jabatan Fungsional Guru Besar saya.
 8. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada para guru saya di SDN Beuracan Jaya, Kabupaten Pidie Jaya yang telah mengenalkan baca tulis kepada saya. Kemudian kepada para guru saya di SMP Negeri 02 Meureudu, dan MAS Darul Arafah Medan. Terima kasih untuk ilmu, pembelajaran, harapan dan semangat yang telah diberikan. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini menjadi wasilah kebaikan dan alasan Allah mencurahkan kebaikan kepada para guru semuanya.
 9. Terima kasih saya ucapkan kepada para guru saya selama berada di pendidikan tinggi. Para guru di STAI Malikussaleh Lhokseumawe (S1), Universitas Padjajaran Bandung (S2), dan Universiti Sains Malaysia (S3), teristimewa Prof. Kamarulzaman Askandar. Terima kasih telah membimbing, mengajarkan, dan mempersiapkan saya untuk menjadi generasi yang kuat, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Inspirasi dan pembelajaran yang diberikan menjadi bekal berharga saya masuk dalam dunia kerja profesional.
 10. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada senior Profesor bidang Sosiologi, Prof. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. (Universitas Indonesia), Prof. Dr. Afrizal, M.A. (Universitas Andalas) dan Prof. Dr. Badaruddin, M.Si (Universitas Sumatera Utara). Tak terlupakan juga Prof. Eka Srimulyani, Ph.D (Universitas Islam Negeri – Ar-Raniry) atas kesediaannya mereview karya ilmiah saya dengan ikhlas tanpa pamrih. Semoga semuanya menjadi amal jariah di akhirat dan penguat hubungan kita yang damai dan konstruktif bagi pengembangan ilmu dan pembangunan.
 11. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta dan tersayang, Dr. Zurriyati, S.Ag., M.Hum, yang telah menggenapkan separuh jiwa, menemani dalam suka dan duka. dan menjadi pendengar yang baik. Bagi saya, istri adalah sosok perempuan yang dalam kamus hidupnya hanya mengenal kata “memberi”. Darinya, saya belajar keikhlasan, ketulusan, dan kesabaran. Darinya pula, saya

meyakini kebenaran dalil Kahlil Gibran, “hanya cinta, bunga yang dapat mekar tanpa bantuan musim”. Benih cinta yang disemainya, akan selalu mekar meskipun di atas bara api. Terima kasih untuk itu semua, Cinta!

12. Kepada anak-anak tercinta dan tersayang; Sajjad Siraja Fata, Sulha Siratul Khaira, Sultan Sadiq Al-fatih, dan Sufi Syafi Al-Mufti. Terima kasih telah menemani perjalanan Abati selama ini. Berjuta kehangatan, inspirasi, cinta, kesabaran dan dukungan telah ananda semua berikan dengan cara ananda masing-masing. Mohon maaf, jika selama ini perhatian Abati kepada “laptop” telah merampas hak ananda untuk memperoleh belaian kasih sayang seorang ayah. Tetaplah menjadi anak-anak Abati yang membanggakan!
13. Terima kasih, teriring doa dan rasa cinta yang amat sangat dalam kepada Ayahanda Zainal Yusuf dan Almarhum Ibunda Nur’aini Binti Beuramat. Jika Tuhan mengizinkan saya untuk memilih siapa yang akan saya jadikan orang tua, dengan tegas saya katakan bahwa saya akan tetap memilih Abu dan Mak. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mengajarkan bagaimana cara hidup hingga saya dewasa. Mak dan Ayah senantiasa mendorong saya untuk cinta pada pendidikan. Terima kasih juga telah mengiringi setiap langkah saya mencapai cita-cita dengan doa dan kasih sayang. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan Abu dan Mak.
14. Penghormatan dan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada mertua yang selalu memberikan perhatian, nasehat, kasih sayang dan dukungan kepada saya. Yang paling penting, telah mempercayai saya untuk menjaga anak gadisnya. Insyaallah, janji itu terenggam erat hingga nyawa terpisah badan.
15. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar, Kakak Fauziah, para adik perempuanku Nurhaliyah, Wirdiawati, Lia Safrina, dan Nur Fadhilah serta adik lelaki Zakiul Fuadi dan Mufli Juni Alhadi yang saya tercinta. Terimakasih telah selalu mendoakan dan menyemangati, mengisi hari-hari suka dan duka saya dengan bahagia. Kepada abang ipar, kakak Ipar dan adik-adik ipar, serta seluruh keponakan yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkah yang saya tempuh saya juga mengucapkan terimakasih tak terhingga
16. Terima kasih kepada segenap kolega dan sejawat di Lingkungan Universitas Malikussaleh, FISIP Universitas Malikussaleh, dan juga Jurusan Antropologi dan Sosiologi, atas semua dukungan yang produktif, dorongan tiada henti hingga tiba pada titik ini. Jujur, ada rasa ingin menyerah dalam perjalanan proses yang memakan waktu bertahun-tahun, namun keberadaan sahabat semua, ibarat oase di padang pasir, yang membuat energi ini kembali terbakar untuk tidak menyerah pada keadaan.
17. Apresiasi dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Teman teman tim penelitian saya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak. Diskusi

akademik yang kita lakukan saban hari telah mengantarkan saya untuk memetik hasilnya hari ini.

18. Terima kasih kepada segenap sahabat *ngopi*, sahabat masa kecil, dan sahabat organisasi. Terima kasih atas semua bantuan dan semangatnya untuk tumbuh bersama dalam menggapai impian dan asa.
19. Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas doa, bantuan, dan dukungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya berdiri di mimbar yang megah pada hari ini, semuanya tidak terlepas dari bantuan, pembinaan, dukungan, dan motivasi dari anda-anda semua.

Para hadirin terhormat yang saya muliakan,

Demikianlah ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas segala anugerah, kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada saya melalui perolehan jabatan Guru Besar ini, semoga Allah swt selalu berikan saya kekuatan, keselamatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan benar. Mengingat kita masih di momen Zulhijjah, melalui mimbar ini saya telah memaafkan para hadirin semua atas khilaf dan kelasaha. Pun demikian, saya juga memohon maaf atas kekhilafan selama saya menjalin interaksi bersama bapak, ibu dan hadirin sekalian. Sekali lagi saya juga menyampaikan permohonan mohon maaf atas segala kelemahan, keterbatasan serta kekurangan dalam pidato pengukuhan saya ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan para hadirin semua. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan merahmati kita dan meridhai acara yang mulia ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akulluezati, B., Ssempala, C., & Ssenkusu, P. (2011). Teachers' perceptions of the effects of young people's war experiences on teaching and learning in Northern Uganda. *Education, Conflict and Development*, 185–207.
- Ansori, M. (2012). From insurgency to bureaucracy: Free Aceh movement, Aceh party and the new face of conflict. *Stability: International Journal of Security and Development*, 1(1).
- Askandar, K. (2006). *Budaya perdamaian budaya kita*. Research and Education for Peace.
- Ay, S. Ç., Keskin, H. K., & Akilli, M. (2019). Examining the Effects of Negotiation and Peer Mediation on Students' Conflict Resolution and Problem-Solving Skills. *International Journal of Instruction*, 12(3), 717–730.
- Bajaj, M. (2016). In the Gaze of Gandhi: Peace education in contemporary India. *Peace Education: International Perspectives*, 107–122.
- Barron, P., Rahmant, E., & Nugroho, K. (2013). *THE CONTESTED CORNERS OF ASIA-Subnational Conflict and International Development Assistance*.
- Bevington, T., Kurian, N., & Cremin, H. (2020). Peace education and citizenship education: Shared critiques. *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education*, 155–168.
- Borkar, V., & Jain, R. (2014). Risk-constrained Markov decision processes. *IEEE Transactions*

on *Automatic Control*, 59(9), 2574–2579.

- Boulding, E. (2002). Peace culture. In Mahnaz Afkhami (Ed.), *Toward a compassionate society* (pp. 8–15). Women's Learning Partnership Bethesda, MD. <https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/copanthology.pdf#page=12>
- Brewer, J. D. (2010). *Peace processes: A sociological approach*. Polity.
- Brock, C. (2011). *Education, refugees and asylum seekers*. Bloomsbury Publishing.
- Castro, L. Navaro & Galace, J. N. (2008). (2008). *Peace Education: A Pathway to A Cultural Peace*. Philippines: Center for Peace Education.
- Coleman, P. (2012). The Missing Piece in Sustainable Peace. *Diakses 27 Mei 2022*.
- Cremin, H., & Bevington, T. (2017). *Positive Peace in Schools: Tackling conflict and creating a culture of peace in the classroom*. Taylor & Francis.
- Cremin, H., & Guilherme, A. (2016). Violence in schools: Perspectives (and hope) from Galtung and Buber. *Educational Philosophy and Theory*, 48(11), 1123–1137.
- Cunningham, J. (2015). *Conflict Transformation through School: a curriculum for sustainable peace*.
- Daimond, J. G. (1997). *Germs and Steel*. WW Norton And Company: New York.
- Das, S., & Das, K. K. (2014). Imparting peace education through coscholastic activities at the school level. *European Scientific Journal*.
- Davies, L. (2015). *The politics of peace education in post-conflict countries*. 32, 1–25. <http://soc.kuleuven.be/crpd/files/working-papers/working-paper-davies.pdf>
- Eliasa, E. I., Kartadinata, S., Ilfiandra, I., & Nurihsan, J. (2019). Pedagogy of peacefulness as an effort of peaceful education at school. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 3(2), 85–96.
- Emkic, E., & Emkic, E. (2018). Conflict Transformation, Sustainable Education and Peace Education. *Reconciliation and Education in Bosnia and Herzegovina: From Segregation to Sustainable Peace*, 19–36.
- Fisher, S. (2000). *Working with conflict: Skills and strategies for action*. Zed books.
- Fisher, S. et al. 2001. (2001). Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak. *Mengelola Konflik*.
- Fountain, S. (1999). *Peace education in UNICEF*. Citeseer.
- Galtung, J. (1967). Theories of peace. *A Synthetic Approach to Peace Thinking*. Oslo: International Peace Research Institute.
- Galtung, J. (1996). Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization. *Peace by Peaceful Means*, 1–292.
- Galtung, J. (2008). Toward a conflictology: the quest for transdisciplinarity. In *Handbook of conflict analysis and resolution* (pp. 537–550). Routledge.
- Gill, S., & Niens, U. (2014). Education as humanisation: Dialogic pedagogy in post-conflict peacebuilding. In *Compare: A Journal of Comparative and International Education* (Vol. 44, Issue 1, pp. 1–9). Taylor & Francis.
- Hantzopoulos, M., Rivera-McCutchen, R. L., & Tyner-Mullings, A. R. (2021). Reframing School Culture Through Project-Based Assessment Tasks: Cultivating Transformative Agency and Humanizing Practices in NYC Public Schools. *Teachers College Record*, 123(4), 1–38.
- Harber, C. (2018). Building back better? Peace education in post-conflict Africa. *Asian Journal of Peacebuilding*, 6(1), 7–27.
- Hick, J. H. (1985). *Problems of religious pluralism*. Springer.
- Higgins, S., & Novelli, M. (2020). Rethinking peace education: A cultural political economy approach. *Comparative Education Review*, 64(1), 1–20.
- Initiative, P. (2008). Introduction to Peacebuilding. *Diakses 21 Juni 2023*.

- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2006). Peace education for consensual peace: The essential role of conflict resolution. *Journal of Peace Education*, 3(2), 147–174.
- King, E. (2011). The multiple relationships between education and conflict: Reflections of Rwandan teachers and students. In *Educating children in conflict zones: A tribute to Jackie Kirk* (pp. 137–151). Teachers College Press.
- Kumar, R. (2012). *Conflict, Peace and Security: A Perspective with Special*.
- Lederach, J. (2015). *Little book of conflict transformation: Clear articulation of the guiding principles by a pioneer in the field*. Simon and Schuster.
- Lederach, J. P. (1996). *Preparing for peace: Conflict transformation across cultures*. Syracuse University Press.
- Lederach, J. P. (1997). Sustainable reconciliation in divided societies. *Washington, DC: USIP*.
- Lederach, J. P. (1999). Justpeace: The challenge of the 21st century. *People Building Peace: 35 Inspiring Stories from around the World*, 27–36.
- Lerch, J. C., & Buckner, E. (2018). From education for peace to education in conflict: Changes in UNESCO discourse, 1945–2015. *Globalisation, Societies and Education*, 16(1), 27–48.
- Lopes Cardozo, M. T. A., & Hoeks, C. C. M. Q. (2015). Losing ground: a critical analysis of teachers' agency for peacebuilding education in Sri Lanka. *Journal of Peace Education*, 12(1), 56–73.
- Maleki, H., & Komishani, F. F. (2014). Explain the Scope and Components of Peace-Oriented Curriculum in Order to Provide a Conceptual Model of Peace Education in Schools. *International Journal of Economy, Management and Social Sciences*, 3(10), 600–603.
- Mayor, F. (2009). Culture of peace. *Institutional Issues Involving Ethics And Justice-Volume III*, 236.
- Mendenhall, M., & Chopra, N. (2016). Educating for peace in Kenya: Insights and lessons learned from peace education initiatives across the country. *Peace Education: International Perspectives*, 89–106122.
- Miall, H. (2004). Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task. In *Transforming Ethnopolitical Conflict* (pp. 67–89). https://doi.org/10.1007/978-3-663-05642-3_4
- Miller, C. A., & King, M. E. (2005). *A glossary of terms and concepts in peace and conflict studies*. University for Peace San Jose, Costa Rica.
- Mitroiu, S., & Adam, E. (2009). Signs of memory and traces of oblivion. *Cultura International Journal of Philosophy of Culture and Axiology*, 6(2), 145–158.
- Narindrani, F. (2018). Upaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 241.
- Navarro-Castro, L., & Nario-Galace, J. (2010). *Peace education: A pathway to the culture of peace*.
- Novelli, M., & Cardozo, M. T. A. L. (2008). Conflict, education and the global south: New critical directions. *International Journal of Educational Development*, 28(4), 473–488.
- Novelli, M., Higgins, S., Ugur, M., & Valiente, O. (2014). *The political economy of education systems in conflict-affected contexts: A rigorous literature review*.
- Novelli, M., & Smith, A. (2011). *The role of education in peacebuilding: A synthesis report of findings from Lebanon, Nepal and Sierra Leone*.
- Quayle, L. (2018). Subnational Conflict Mitigation: Networks, Innovations, and the Uncertain Place of ASEAN. *International Security in the Asia-Pacific: Transcending ASEAN towards Transitional Polycentrism*, 331–356.
- Reychler, L. (2002). Peace architecture. *Peace and Conflict Studies*, 9(1), 25–35.
- Ritaiuw, S. P. (2017). The development of design model of conflict resolution education based on

cultural values of pela. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 36(3).

- Saputra, A. (2022). *Konflik dan Pembelahan Elit GAM Pasca Damai Aceh (Perspektif Sosiologi Politik)*. Universitas Gadjah Mada.
- Shepler, S. (2011). Helping our children will help in the reconstruction of our country: Repatriated refugee teachers in post-conflict Sierra Leone and Liberia. *Educating Children in Conflict Zones: Research Policy and Practice for Systematic Change*, 199–217.
- Smith, A. (2010). *The influence of education on conflict and peace building, Background paper prepared for the Education for All Global Monitoring Report 2011 The Hidden Crisis: Armed conflict and education, Paris: UNESCO*.
- Smith, A., & Ellison, C. (2015). The integration of education and peacebuilding: a review of the literature (Research Consortium on Education and Peacebuilding/University of Ulster research output). Retrieved from *Education and Development, University of Amsterdam Website: <https://Educationanddevelopment.files.wordpress.com/2014/11/Integration-Ofeducation-and-Peacebuilding.Pdf>*.
- Tinker, V. (2016). Peace education as a post-conflict peacebuilding tool. *All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace*, 5(1), 27–42.
- Tschirgi, N. (2011). Conflict Management and Peacebuilding: Examining the Interface between Local and International Approaches. *24th Annual IACM Conference, Istanbul, Turkey, July, 3–6*.
- Turk, F. (2018). Evaluation of the effects of conflict resolution, peace education and peer mediation: A meta-analysis study. *International Education Studies*, 11(1), 25–43.
- Ubogu, R. (2016). Peace Education in Secondary Schools: A Strategic Tool for Peace Building and Peace Culture in Nigeria. *Journal of Education and Practice*, 7(14), 88–92.
- Waldron, J. (2009). Judges as moral reasoners. *International Journal of Constitutional Law*, 7(1), 2–24.
- Walter, E. M., Beach, A. L., Henderson, C., Williams, C. T., & Ceballos-Madrigal, I. (2021). Understanding Conditions for Teaching Innovation in Postsecondary Education: Development and Validation of the Survey of Climate for Instructional Improvement (SCII). *International Journal of Technology in Education*, 4(2), 166–199.
- Warnecke, A., & Franke, V. C. (2010). Sustainable conflict transformation an analytical model for assessing the contribution of development activities to peacebuilding. *International Journal of Peace Studies*, 71–93.
- Webel, C., & Galtung, J. (2007). *Handbook of peace and conflict studies* (Vol. 7). Routledge London.
- Wintersteiner, W. (2013). Building a global community for a culture of peace: The Hague appeal for peace global campaign for peace education (1999–2006). *Journal of Peace Education*, 10(2), 138–156.
- Zainal, S. (2016). Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*. <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757>
- Zainal, S., & Askandar, K. (2013). Transformasi Politik dan Prospek Bagi Perdamaian Positif Berkelanjutan di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 3(2), 553–566.
- Zainal, S., Prasetyo, M. A. M., & Yaacob, C. M. A. (2022). Adopting Pesantren-Based Junior High School Programs: The Pesantren Change Its Educational System without Conflict. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(2), 260. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.13525>
- Zainal, S., Yunus, S., & A Jalil, F. (2020). Direct Integration of Peace Education and Its Effects on Students' Understanding of Peace. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 2112–2120.

PROFIL SINGKAT

Bersama ini disampaikan riwayat perjalanan ilmiah dan profesionalisme saya. Profesor Doktor Suadi Sarjana Agama, Master of Sains, disebut Prof. Dr. Suadi, S.Ag., M.Si

Lahir disebuah gampong pesisir timur Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, gampong terpencil ini bernama Gampong Meunasah Rumpuen pada tanggal 16 Agustus 1976. Lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat mencintai dan peduli terhadap Lembaga Pendidikan Agama Islam, pasangan keluarga sederhana Zainal Bin Yusuf dan Nuraini Binti Beuramat.

Menghabiskan masa kanak-kanak hingga remaja di tanah kelahiran. Anak kedua dari delapan bersaudara, awalnya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang Profesor bahkan bersekolah tinggi selain alasan kondisi sosial tempat tinggalnya yang terisolir, berada di bantaran sungai Beuracan, juga beban ekonomi orang tua terhadap biaya Pendidikan kakak dan adik-adik. Namun karena doa dan dukungan keluarga atas keteguhan dalam menuntut ilmu pengetahuan, Allah telah mentaqdirkan saya menjadi seorang guru besar sosiologi di bidang konflik dan perdamaian.

Menikah dengan Dr. Zurriyati, S.Ag., M.Hum pada tahun 2004, dan telah dikarunia 4 orang anak (3 putra dan 1 putri), yakni:

- Sajjad Siraja Fata, sedang menempuh Pendidikan di SMAIT Al-Arabiyah Banda Aceh
- Sulha Siratul Khaira, sedang menempuh Pendidikan SMPIT Dar Maryam Banda Aceh)
- Sultan Sadiq Al-Fatih, sedang menempuh Pendidikan SDIT Ulumuddin Lhokseumawe
- Sufi Syafi Al-Mufti, sedang menempuh Pendidikan SDIT Ulumuddin Lhokseumawe

Pendidika Formal. Lulus di Sekolah Dasar Negeri Beuracan Jaya Meureudu Pidie Tahun 1987. Kemudian lulus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Meureudu Pidie pada tahun 1991. Selanjutnya, melanjutkan ke Pesantren Moderen Darul Arafah Medan Sumatera Utara dan lulus pada tahun 1995.

Selanjutnya Profesor Suadi lulus Sarjana Agama pada STAI Malikussaleh

Lhokseumawe tahun 2000. Pada tahun 2005, lulus di program studi Sosiologi Universitas Padjadjaran sebagai Master of Sains bidang sosiologi. Kemudian pada tahun 2015, menuntaskan program Doktor di Pusat Riset dan Pendidikan untuk Perdamaian, Universiti Sains Malaysia.

Karir dan Aktivitas di Perguruan Tinggi. Mulai bergabung dengan Universitas Malikussaleh sebagai dosen sejak tahun 2003, Telah meluluskan lebih 200 Sarjana Strata I dan lebih 20 Magister Strata 2 (Sebagai Pembimbing). Pada Tahun 2006 s/d 2008 Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Sosiologi. Selanjutnya Pembantu Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2008 s/d 2012. Sejak tahun 2020 hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

Sejak tahun 2014 hingga tahun 2023, telah banyak memenangkan hibah penelitian bersama koleganya, baik di level daerah dan nasional, dengan skema desentralisasi, kompetitif nasional maupun PNPB Unimal.

- 2014, Skema PEKERTI: Strategi Nafkah Rumah Tangga Miskin dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Aceh (Sumber Dana DRPM)
- 2014: Makanan Tradisional Aceh dan Potensi Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Sumber Dana Pemda Aceh LPSDM)
- 2014-2015, Skema MP3EI: Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Komoditi Sawit Di Kabupaten Aceh Timur (Sumber Dana DRPM)
- 2016-2017 Skema MP3EI: Implementasi Model Integrasi Komoditi Sawit Dan Sapi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Sumber Dana DRPM)
- 2017-2019, Skema Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan (PSHP) dan Penelitian Strategis Nasional (PSN): Model Pendidikan Perdamaian Pasca Konflik di Aceh Timur (Sumber Dana DRPM).
- 2017 : Aceh Utara dalam Lintasan Sejarah Aceh: Satu Background untuk Pembangunan Aceh Utara Berkelanjutan (Sumber The Asia Foundation Bytra).
- 2019-2021, Skema Riset Dasar: Penguatan Modal Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan Petani di Aceh (Sumber Dana DRPM)
- 2020, Skema Lektor Kepala: Keterlibatan Mantan Aktor Konflik dalam Pengembangan UMKM di Aceh Utara (Sumber Dana PNPB UNIMAL)
- 2022, Skema Riset Dasar: Model Ekonomi Hijau Kawasan Hutan Lindung (Studi tentang Modal Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Parawisata di Kawasan Hutan Lindung Bur Telege Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Sumber Dana DRPM).

- 2022, Skema Lektor Kepala: Model Transformasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir di Aceh (Studi Tentang Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pariwisata Hutan Mangrove di Kota Langsa) (Sumber Dana PNBP Universitas Malikussaleh).
- 2023 Skema Riset Dasar: Model Pengembangan Kelapa Sawit Pro Perdamaian Positif Berkelanjutan (Studi tentang Pengembangan Usaha Kelapa Sawit Mantan Anggota Gerakan Darul Islam di Aceh Tamiang dan Langkat Sumatera Utara) (Sumber Dana DIKTI -BIMA).

Hasil-hasil riset tersebut telah dipublikasikan di jurnal internasional dan Internasional bereputasi bersama koleganya; bereputasi Q1, Q2, Q3 dan Q4 serta internasional. Selain itu, juga dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan nasional. Kini juga telah menerbitkan beberapa buku bersama kolega baik sebagai penulis pertama dan penulis anggota serta memperoleh beberapa Hak Kekayaan Intelektual bersama kolega. Hingga sekarang memiliki SINTA Score Overall 558 dan SINTA Score 3Yr 262. (Detail dapat dilihat pada laman; <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5978357>).

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, aktif sebagai Editor in Chief Jurnal Internasional Malikussaleh Social and Political Reviews (MSPR) Terakreditasi SINTA 5 dan reviewer jurnal International bereputasi dan Jurnal Nasional Terakreditasi. Selain itu, juga telah malang melintang diluar kampus. Pada tahun 2006-2007 menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Aceh di Kota Lhokseumawe; Koordinator Pemberdayaan Ekonomi Produktif Berbasis Sosial di Gedung Pasee-Aceh Utara Tahun 2007-2008; dan pada tahun 2008-2009 Manager Program Pembangunan Untuk Perdamaian di Aceh Utara MAPAN-SERASI (USAID).

Dalam kepakaran sebagai guru besar di bidang konflik dan perdamaian, telah banyak menjadi narasumber, antara lain:

- Narasumber Pada “The Multi – Stakeholders Forum: Support for Sustainable Positive Peace in Aceh. Consorcium for New Aceh – IDRC di Banda Aceh. Tahun 2015
- Narasumber pada “Governance and Insider Peacebuilders in Societies in War to Peace Transition Experiences from South and Southeast Asia. Foundation –USM di Penang Malaysia. Tahun 2016.
- Narasumber pada Lokakarya Membangun Bersama Skenario Masa Depan “Aceh Utara Menuju Pembangunan Berkelanjutan”. Tahun 2017

- Invited Speaker pada International Seminar and Oil Palm Course for Peace. Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Tahun 2018.
- Pemateri pada Workshop Pendidikan Perdamaian di Sekolah. Tahun 2019

Penghargaan, telah mendapat penghargaan:

- Satyalancana Karya Satya 10 tahun bertugas dari Presiden Republik Indonesia, tahun 2017.

Alhamdulillah, dengan berkat Rahmad Allah SWT, pada tanggal 01 Desember 2022, Menteri Pendidikan, kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan tentang Kenaikan Jabatan Akademik/ Fungsional Dosen, saya ditetapkan sebagai Profesor atau Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dengan jumlah unsur utama dan unsur penunjang 1.051,50.

Demikian disampaikan dengan sesungguhnya, semoga bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Lhokseumawe, Juli 2023



(Prof. Dr. Suadi, S.Ag., M.Si)